

## **KSA Komit Patuhi Prinsip RSPO Dan Ketentuan Pemerintah**

*Jakarta, 15 Januari 2016,*

PT Kalimantan Sawit Abadi (KSA) menyatakan pembukaan lahan di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan kriteria yang digariskan oleh RSPO.

“Kami perlu menegaskan bahwa PT KSA memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu mematuhi ketentuan dan peraturan pemerintah, dan sangat memperhatikan dan mengikuti semua prinsip serta kriteria RSPO,” kata Rimbun Situmorang di Jakarta, Jumat (15/1).

Menurut Rimbun Situmorang, PT Kalimantan Sawit Abadi (KSA) telah melakukan verifikasi kegiatan pembukaan lahan di areal perluasan 1800 Ha, dengan melibatkan Konsultan Independen yaitu Daemeter dan Remark Asia, untuk memastikan bahwa kegiatan pembukaan lahan tersebut memang benar telah dihentikan.

“Semula ada indikasi bahwa kami telah dinyatakan melakukan pembukaan lahan di areal gambut, di areal yang memiliki stok karbon tinggi (High Carbon Stock/HCS). Namun hasil verifikasi yang dilakukan oleh konsultan independen tersebut dan telah disampaikan dalam acara *SSMS Buyers Gathering and Sustainability Update* pada hari Kamis tanggal 14 Januari lalu di Jakarta, telah memastikan bahwa kami telah menghentikan pembukaan lahan tersebut,” ujar Rimbun menegaskan.

Dijelaskan oleh Rimbun, pihaknya tidak akan gegabah dan sembarangan dalam melakukan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. PT KSA, menurut dia, memiliki komitmen untuk selalu mematuhi peraturan nasional yang berlaku serta Prinsip & Kriteria RSPO, tidak melakukan pengembangan di areal gambut sesuai dengan peraturan, berupaya tidak melakukan pembukaan lahan di areal yang memiliki stok karbon tinggi (HCS), “meskipun sebenarnya di RSPO hal tersebut masih menjadi bahan pembahasan. Pemerintah Indonesia juga sampai saat ini belum menjadikan hal itu sebagai ketentuan yang baku dan dijalankan secara resmi,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa pihaknya selalu memenuhi prinsip Free, Prior, Informed, Consent (FPIC) dalam pembukaan lahan.

Ia menambahkan, verifikasi yang dilakukan oleh Daemeter dan Remark Asia dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan studi-studi yang sebelumnya telah dilakukan oleh KSA, yaitu asesmen kawasan bernilai konservasi tinggi (*high conservation value/HCV area*) dan analisis dampak sosial (*social impact assessment/SIA*) oleh Aksenta; studi karbon oleh Cerindonesia; studi analisis perubahan tataguna lahan (*land use change analysis/LUCA*) oleh Aksenta; prosedur penanaman baru (*new planting procedure/NPP*) Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) dan studi populasi orangutan oleh Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).

Pemetaan partisipatif juga telah dilakukan pada tahun 2015 di kawasan PT KSA, sesaat setelah perusahaan menghentikan pembukaan lahan. Berdasarkan pemetaan partisipatif dan verifikasi lapangan, keterlanjuran pembukaan lahan sebagian besar berada di areal plasma karena adanya desakan masyarakat.

Selain itu, berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain (Revisi VI) tahun 2014, areal PT KSA 1800 Ha tidak dimasukkan di dalamnya. Dalam *SSMS Buyers Gathering* juga disampaikan bahwa terhadap areal konservasi yang ada akan dibuat koridor yang menghubungkan antar areal konservasi untuk memberikan ruang gerak bagi orangutan dan satwa lainnya.

### **Kompensasi Jangka Panjang**

Dijelaskan oleh Rimbun, pihaknya tidak tinggal diam atas keterlanjuran pembukaan lahan yang dilakukan oleh KSA. Sebagai model kompensasi (*compensation model*), menurut dia, akan dibuat proyek jangka panjang pengelolaan lansekap (*landscape management*). Kegiatan ini melibatkan berbagai lembaga, ahli ekologi sosial dan praktisi termasuk di antaranya Daemeter, ReMark Asia, BOSF dan ESMG Institut Pertanian Bogor dengan fokus kegiatan meningkatkan nilai konservasi terintegrasi pada daerah aliran sungai (DAS) Jelai.

“Kami memastikan kegiatan operasional PT Kalimantan Sawit Abadi dilaksanakan mematuhi prosedur dan perundangan yang berlaku,” demikian disampaikan Rimbun Situmorang. Menurut dia langkah-langkah tersebut sangat penting dilakukan sebagai verifikasi persyaratan ketat dari pasar. “Berbagai studi yang dilaksanakan adalah upaya nyata PT KSA yang merespon masukan dari pasar sekaligus bentuk tanggungjawab perusahaan memastikan komitmen terhadap pemangku kepentingan,” katanya, seraya menambahkan bahwa studi tersebut melibatkan Universitas Mulawarman dalam proses pemantauan keanekaragaman hayati.